



RENCANA KERJA 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan sebagian tugas yaitu tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2023. Rencana Kerja tersebut sebagai acuan dan pedoman bagi Dinas/Badan/kantor/satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah serta menjadi acuan masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2023 merupakan Tahun Ketiga dari Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026, Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pemalang berisi program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten pemalang yang merupakan dokumen rancangan rencana pembangunan Perangkat Daerah selama 1 (satu) Tahun.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang masih belum sempurna. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak untuk bahan perbaikan dari semua pihak yang berkepentingan sangat kami harapkan.

Pemalang, Maret 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG



RAHARJO, S.IP., MAP
Pembina Tk. I

NIP. 19691203 199003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN 5	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	29
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	30
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	35
3.3 Program dan Kegiatan	35
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
4.1 Rencana Pendanaan	44
BAB 5 PENUTUP	56
5.1 Kaidah Pelaksanaan	56
5.2 Rencana Tindak lanjut	57

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk satu tahun ke depan. Fungsi Rancangan Renja-OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis OPD. Rancangan Renja-OPD memuat hasil evaluasi renja tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dan pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, dengan berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian Rancangan Renja-OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja OPD dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam laporan kinerja yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Visi pembangunan Kabupaten Pemalang yang dituangkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021- 2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”** yang selanjutnya dijabarkan dalam 2 (dua) misi yaitu :

1. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan;
2. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Sejalan dengan misi pertama pembangunan Kabupaten Pemalang yakni “Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan” dengan penekanan pada aspek mewujudkan infrastruktur yang mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Penjabaran dari arah kebijakan tersebut dituangkan dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021-2026.

Arah pembangunan bidang lingkungan hidup adalah untuk mendukung capaian program sasaran pembangunan Kabupaten Pemalang “ Meningkatkan kualitas lingkungan hidup” dimana prioritas utamanya adalah untuk mewujudkan 9 (sembilan) sasaran perangkat daerah, yaitu:

1. Terkendalinya sumber sumber pencemar Udara;
2. Terkendalinya Sumber Sumber Pencemar Air;

3. Meningkatnya Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim;
4. Meningkatnya luasan tutupan vegetasi;
5. Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
6. Meningkatnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Pelayanan persampahan;
8. Terkelolanya Sampah Mulai dari Sumbernya;
9. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator kinerja nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi;

Dalam rangka mewujudkan ketercapaian sasaran di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang menyusun Rencana Kerja Tahun 2023 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana, dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA-OPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2. Landasan Hukum

Seiring pelaksanaan otonomi daerah, daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengelola pembangunan daerahnya, termasuk pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib Kabupaten berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup;
- Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
- Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;
- Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

- Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah;
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan antara pemerintahan, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ;
- Peraturan menteri negara lingkungan hidup No. 19 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
- Peraturan menteri dalam negeri No. 59 Tahun 2007, tentang perubahan peraturan menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah provinsi Jawa tengah No. 8 Tahun 2006 tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan provinsi Jawa tengah;
- Peraturan Daerah provinsi Jawa tengah No. 5 Tahun 2007 tentang lingkungan hidup;
- Peraturan Daerah provinsi jawa tengah No. 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jawa tengah 2005-2025;

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa tengah No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa tengah Tahun 2014;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No. 16 Tahun 2003 tentang pengelolaan lingkungan hidup;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pemalang 2016-2021;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13).
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2050;
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.
- Peraturan Bupati Pemalang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;

- Peraturan Bupati Pematang Nomor 134 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang.
- Peraturan Bupati Pematang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pematang Tahun 2021.

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RENJA OPD ini adalah sebagai berikut :

1. Menjamin konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mendukung pencapaian visi misi pembangunan daerah.
2. Menjamin keterpaduan arah kebijakan dan strategi RPJMD serta keselarasan program dan kegiatan yang mengalami perubahan sesuai sasaran dalam rencana strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam Renja PD setiap tahunnya
3. Sebagai alat untuk mengukur kinerja instansi

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA OPD ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2021 sebagai bahan penyusunan Renja Tahun 2023 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023 agar sesuai dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang khususnya dan arah pembangunan Kabupaten Pematang pada umumnya.

I.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB 2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2021 DLH melaksanakan urusan lingkungan hidup dengan anggaran murni sebesar Rp. 33.264.955.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a) Belanja Daerah Rp. 33.494.955.000,- terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 29.636.790.445,- dan belanja modal sebesar Rp. 3.858.164.555,-;
- b) Pendapatan Daerah Rp. 230.000.000,-

Selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp. 27.448.766.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a) Belanja Daerah sebesar Rp. 27.748.766.000,- terdiri dari belanja operasi Rp. 24.565.025.220,- dan belanja modal sebesar Rp. 3.183.740.780,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.957.923.772,00. Dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.38.330.492.410,- dan realisasi belanja modal sebesar Rp. 26.113.994.897,00.
- b) Pendapatan Daerah Rp. 300.000.000,-

Dengan demikian, rincian realisasi belanja APBD secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2022

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi target kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat capaian realisasi target Renstra	Tingkat capaian realisasi target Renstra
2	3			8	9		10	11	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota									
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	2	2	2	100	2	4	66.66
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	1	1	1	100	1	2	33.33
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100	171	171	171	100	171	342	31.09
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72	12	12	12	100	12	24	33.33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6	1	1	1	100	1	2	33.33
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	12	2	2	2	100	2	4	33.33

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat capaian realisasi target Renstra	Tingkat capaian realisasi target Renstra
2	3			8	9		10	11	
	Triwulanan/ Semesteran SKPD								
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	1	1	1	100	1	2	33.33
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	18	3	3	3	100	3	6	33.33
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	30	30	30	100	30	60	20
Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	2	2	2	100	2	4	33.33
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	2	2	2	100	2	4	33.33
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	2	2	2	100	2	4	33.33
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	18	3	3	3	100	3	4	22.22
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	48	6	6	6	100	6	12	25
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18	3	3	3	100	3	6	33.33
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1500	224	224	224	100	224	448	29.86

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat capaian realisasi target Renstra	Tingkat capaian realisasi target Renstra
2	3			8	9			10	11
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	12	5	5	5	100	0	5	41.66
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	2	2	2	100	2	4	33.33
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60	12	12	12	100	12	24	40
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	1	1	1	100	1	2	33.33
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6	1	1	1	100	1	2	33.33
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	1	1	1	100	1	2	33.33
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas, Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	120	20	20	20	100	20	40	33.33
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30	5	5	5	100	5	10	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	5	5	5	100	5	10	33.33

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat capaian realisasi target Renstra	Tingkat capaian realisasi target Renstra
2	3			8	9			10	11
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	3	3	3	100	3	3	100
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30	5	5	5	100	5	10	33.33
Penataan Organisasi									
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	1	1	1	100	1	2	33.33
Program Perencanaan Lingkungan Hidup									
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota									
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	13	3	3	3	100	2	5	38.46
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota									
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	1	1	1	100	0	2	100
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup									
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota									
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap	6	1	1	1	100	1	2	33.33

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat capaian realisasi target Renstra	Tingkat capaian realisasi target Renstra
2	3			8	9		10	11	
Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Media Tanah, Air, Udara, dan Laut								
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6	1	1	1	100	1	2	33.33
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota									
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	6	1	1	1	100	1	2	33.33
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota									
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	6	1	1	1	100	1	2	33.33
Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)									
Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota									
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	6	1	1	1	100	1	2	33.33
Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota								
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Limbah (B3)									

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat capaian realisasi target Renstra	Tingkat capaian realisasi target Renstra
2	3			8	9			10	11
Penyimpanan Sementara Limbah B3									
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	6	1	1	1	100	1	2	33.33
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)									
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Perlindungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota									
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6	1	1	1	100	1	2	33.33
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat									
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	12	2	2	2	100	2	4	33.33

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat capaian realisasi target Renstra	Tingkat capaian realisasi target Renstra
2	3			8	9		8	10	11
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	48	8	8	8	100	8	16	33.33
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat									
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota									
Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	90	15	15	15	100	15	30	33.33
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup									
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota									
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	90	15	15	15	100	15	30	33.33
Program Pengelolaan Persampahan									
Pengelolaan Sampah									
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	12	2	2	2	100	2	4	33.33
Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran	6	1	1	1	100	1	2	33.33

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi target Kinerja Hasil program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Tingkat capaian realisasi target Renstra	Tingkat capaian realisasi target Renstra
2	3			8	9		10	11	
	Ulang dan Pemanfaatan Kembali								
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	128840	80000	80000	80000	100	88000	88000	68.30
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/ TPST/ SPA/ Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	594	99	99	99	100	157	256	43.09

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan DLH merupakan pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan DLH dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan DLH sesuai dengan tugas dan fungsi. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis OPD. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021 – 2026, indikator kinerja urusan lingkungan hidup adalah Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan. Indikator kinerja beserta target dan capaian realisasinya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan	%	78,92	79,92	80,92	81,92	78,92	79,92	80,92	81,92	Proyeksi disamakan dengan target
2	Skor indeks pencemaran udara	Indeks	85,62	89,37	89,43	89,48	85,62	89,37	89,43	89,48	
3	Skor indeks pencemaran air	Indeks	47,33	46,24	46,56	47,28	47,33	46,24	46,56	47,28	
4	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Penyelesaian kasus lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%	50	60	70	80	40	40	40	40	
8	Persentase luasan Ruang	%	43,070	43,074	43,078	43,083	43,070	43,074	43,078	43,083	

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
	Terbuka Hijau (RTH) publik									
9	Persentase penanganan lahan kritis	%	0,0263	0,0363	0,0463	0,0563	0,0263	0,0363	0,0463	0,0563
10	Kualitas pengelolaan sampah di wilayah Kab. Pematang	%	71,43	78,57	78,57	85,71	71,43	78,57	78,57	85,71
11	Persentase Penanganan sampah	%	74,97	73,99	72,92	71,83	74,97	73,99	72,92	71,83
12	Persentase pengurangan sampah	%	22,88	23,94	25,88	26,94	22,88	23,94	25,88	26,94

Dari semua indikator yang dilakukan pengukuran pada tahun 2020 dan 2021 perencanaan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup capaiannya sesuai target namun akan di tingkatkan lagi kualitas capaiannya di tahun berikutnya.

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

- a. Permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
 - 1) Penjabaran (cascading) terkait pelaksanaan beberapa program dan kegiatan belum secara logis menunjukkan keterkaitan sebab-akibat maupun keterkaitan sinergitas;
 - 2) Belum optimalnya koordinasi antar sektor dalam rangka penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 3) Beberapa permasalahan yang dihadapi tidak cukup diatasi dengan penanganan jangka pendek sehingga perlu pemilihan strategi dan kebijakan yang tepat dalam menyusun program dan kegiatan agar mampu merespon hal tersebut;
 - 4) Rendahnya kapasitas aparatur dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 5) Luasnya kerusakan cadangan sumber daya alam karena pengelolaan yang tidak sesuai dengan fungsinya sehingga dapat mengancam ketersediaan sumber-sumber mata air;
 - 6) Kerusakan lahan akibat penambangan tanpa ijin, dimana Kerusakan lahan akibat aktivitas penambangan ini sudah sampai taraf yang mengkhawatirkan. Adapun jenis

penambangan lainnya dengan status tanpa izin yaitu penambangan tanah urug yang mengakibatkan adanya bekas-bekas galian dan berpotensi menyebabkan terjadinya tanah longsor, kerusakan fasilitas umum seperti jalan dan lahan area tambang menjadi rusak;

- 7) Tim pengawasan belum memiliki alat pengawasan yang lengkap sebagai alat pembuktian di lapangan. Selain itu, belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang memiliki fungsi strategis, misalnya PPNS yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka penegakan hukum lingkungan
- 8) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup;
- 9) TPA Pegongsoran merupakan tempat untuk pengelolaan akhir sampah Kabupaten Pemalang hampir overload, sehingga diperlukan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sebelum sampai di TPA.

b. Hambatan

- 1) Kerjasama multipihak masih terhambat oleh adanya pemikiran sektoral yang memandang masalah lingkungan hidup semata-mata sebagai tanggung jawab instansi lingkungan hidup
- 2) Meskipun pemerintah pusat sudah mencanangkan program Satu Data Indonesia (SDI) sejak tahun 2019, akan tetapi implementasinya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan masih terhambat oleh belum optimalnya interoperabilitas antar lembaga/organisasi dan belum familiernya investasi pada infrastruktur digital di lembaga pemerintah untuk mendukung pengelolaan data
- 3) Belum semua kepala daerah (kabupaten/kota) bersedia menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggar hukum lingkungan karena dianggap dapat menghambat investasi;

c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan DLH

- 1) Penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah milik Kementerian Dalam Negeri yang masih tahap trial error
- 2) Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak serius terhadap sektor ekonomi dan sosial budaya masyarakat serta turut pula mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah

- 3) Dengan ditetapkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) maka terdapat beberapa ketentuan baru yang harus diantisipasi misalnya mengenai mekanisme perizinan pemanfaatan kawasan hutan dan mekanisme perizinan lingkungan yang disederhanakan.

Dengan memperhatikan hal – hal tersebut di atas maka isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas DLH Kabupaten Pematang Jaya tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Dengan adanya pandemi yang belum ada tanda – tanda akan mereda, maka penyelenggaraan program dan kegiatan akan dibuat seefektif dan seefisien mungkin dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- b) Peningkatan kenyamanan bangunan di lingkungan kerja dan pemenuhan sarana prasarana pendukung kerja untuk mendukung produktivitas kerja;
- c) Kegiatan Pengujian Parameter Lingkungan dan Pengendali Mutu Laboratorium Lingkungan yang semula mendukung sasaran program Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup menjadi mendukung sasaran Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- d) Obyek/penerima manfaat dari program dan kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan akan lebih banyak melibatkan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan kesetaraan gender;
- e) Untuk menangani TPA Pegongsoran yang hampir overload, maka prioritas pendanaan pengelolaan sampah di TPA Pegongsoran untuk tahun 2022 adalah untuk penambahan sarana dan prasarana khususnya alat berat yang digunakan untuk penataan sampah agar operasionalisasi TPA tetap berjalan dan dapat melayani masyarakat.

II.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perencanaan terutama untuk penyusunan RKPD tahun 2023, yang selain harus mempedomani program/kegiatan sesuai RPJMD, juga harus mengakomodir kegiatan/sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 tahun 2019 sehingga harus melakukan langkah persandingan dari

keduanya. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dengan pemberlakuan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ini dapat menjadi “single codebase” yang digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan.

Secara terperinci review terhadap Rancangan Awal RKPD 2023 jika dibandingkan dengan hasil Analisis Kebutuhan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pematang Tahun 2023

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				18,790,640,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19,437,640,000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terkordinirnya penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	15,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terkordinirnya penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	15,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	10,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14,397,272,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				14,397,272,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	172 orang / bulan	14,367,272,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	172 orang / bulan	14,367,272,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 dokumen	10,000,000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	10,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	10,000,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				218,500,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				218,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200,000,000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	18,500,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	18,500,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				416,576,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				462,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8,374,600	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	10,650,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	12,000,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	5,545,400	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	10,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	160,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	180,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	29,856,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	40,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	6,650,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	10,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 lapora	195,500,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 lapora	200,000,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				65,450,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,000,000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 unit	48,450,000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 unit	60,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	17,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	40,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,466,480,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,960,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		JUmlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2500 lapor	10,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		JUmlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2500 lapor	10,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	150,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	150,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3,306,480,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3,800,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				201,362,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				275,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 unit	120,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 unit	150,000,000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	5,000,000	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	5,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	9,982,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	10,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	58,200,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	100,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	8,180,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	10,000,000	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				130,000,000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				315,000,000	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				106,000,000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				265,000,000	
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang	1 dokumen	106,000,000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang	1 dokumen	265,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota					Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota			
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				24,000,000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				50,000,000	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	24,000,000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	50,000,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				527,152,000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				1.220,000,000	
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				527,152,000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.220,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dokumen	60,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dokumen	240,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	14,460,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	250,000,000	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 dokumen	452,692,000	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 dokumen	730,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				100,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				200,000,000	
	Pengelolaan Keanekaragaman				100,000,000	Pengelolaan Keanekaragaman				200,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Hayati Kabupaten/Kota					Hayati Kabupaten/Kota					
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	100,000,000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	200,000,000	
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				20,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				50,000,000	
	Penyimpanan sementara Limbah B3				20,000,000	Penyimpanan sementara Limbah B3				50,000,000	
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	25 laporan	20,000,000	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	25 laporan	25,000,000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				160,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				210,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				160,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				210,000,000	
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 laporan	160,000,000	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 laporan	210,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				171,000,000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				400,000,000	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				171,000,000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				400,000,000	
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4 lembaga	67,371,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4 lembaga	250,000,000	
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	11 dokume	103,629,000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup		Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	11 dokume	150,000,000	
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				34,000,000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				100,000,000	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				34,000,000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100,000,000	
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	11 entitas	34,000,000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	11 entitas	100,000,000	
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				40,000,000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				40,000,000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				50,000,000	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	15 dokume	40,000,000	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota		Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	15 dokume	50,000,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				5,222,848,000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				8,400,000,000	
	Pengelolaan Sampah				5,222,848,000	Pengelolaan Sampah				8,400,000,000	
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 dokumen	87,000,000	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 dokumen	100,000,000	
	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 laporan	35,848,000	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali		Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 laporan	100,000,000	
	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	80000 ton	5,035,000,000	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	80000 ton	8,000,000,000	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	110 unit	65,000,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	110 unit	200,000,000	

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam menyusun RKPD, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang. Selain itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah melalui perencanaan pembangunan daerah yaitu Musrenbang pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan Nasional. Melalui Musrenbang diharapkan dapat mensinkronkan dan merekonsiliasikan pendekatan top down dan bottom up.

Tabel. 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

No	Kegiatan	Pengusul	Lokasi	Besaran/ Volume	Anggaran (Rp)	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik	Kepala Desa Cawet	Desa Cawet Kec. Watukumpul	20 Orang	50.000.000	
2	Pelatihan Pengolahan Sampah	Kepala Desa Majalangu	Desa Majalangu Kec. Watukumpul	50 Orang	50.000.000	
3	Pelatihan Penanganan Sampah Berbasis Magot	Kepala Desa Kuta	Desa Kuta Kec. Belik	30 Orang	50.000.000	
4	Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik	Kepala Desa Mandiraja	Desa Mandiraja Kec. Moga	25 Orang	50.000.000	
5	Pelatihan Budidaya Magot	Kepala Desa Sokawati	Desa Sokawati Kec. Ampelgading	30 Orang	50.000.000	
6	Pelatihan pengelolaan sampah menjadi kompos	Kepala Desa Lawangrejo	Desa Lawangrejo Kec. Pemalang	50 Orang	50.000.000	
7	Pelatihan pengelolaan/ pengolahan sampah menjadi kompos	Kepala Desa Banjarmulya	Desa Banjarmulya Kec. Pemalang	25 Orang	50.000.000	

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Kabupaten Pemalang. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Pemalang harus sejalan dan selaras dengan prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007.

RPJPN Tahun 2005-2025 menempatkan pembangunan di bidang lingkungan hidup untuk mendukung Misi 6 yakni mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari. Sedangkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yakni :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

RPJMN Tahun 2020-2024 menempatkan pembangunan di bidang lingkungan hidup untuk mendukung Misi 7 yakni membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

Berdasarkan kebijakan tersebut diatas dibuat Sasaran, target, dan indikator outcome untuk prioritas nasional membangun lingkungan hidup dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel.3.1 Sasaran RPJMN 2020-2024 Bidang Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator	Target 2024
1.	Peningkatan Kualitas	Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,5
		Indeks Kualitas Air (IKA)	55,5
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	60,5

No	Sasaran	Indikator	Target 2024
	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL)	65,5
2.	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (persen PDB)	0,10
		Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen PDB)	1,15
		Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	3,0
3.	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	13,2
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	58,3
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	9,4
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	2,9
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	7,3

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, Sasaran utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024 adalah :

1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
5. Penanggulangan Bencana
6. Peningkatan Ketahanan Iklim
7. Pembangunan Energi Berkelanjutan
8. Pemulihan Lahan Berkelanjutan
9. Pengelolaan Limbah
10. Pengembangan Industri Hijau
11. Rendah Karbon Pesisir dan Laut

Adapun Visi pembangunan Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yakni:

**“ Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan berdikari, Tetep
Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi ”**

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 menempatkan pembangunan di bidang lingkungan hidup untuk mendukung Misi 4 yakni menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan. Untuk mendukung Misi 4 tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yakni :

- 1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan di Jawa Tengah;
- 2) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya hutan/lahan secara lestari;
- 3) meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik.

Sasaran utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan antara lain :

- 1) menurunnya pencemaran air permukaan;
- 2) menurunnya pencemaran udara;
- 3) meningkatnya luas tutupan lahan;
- 4) meningkatnya PDRB subsector kehutanan;
- 5) meningkatnya kinerja aparatur.

Adapun sesuai Surat Edaran Nomor : 050/0017371 tanggal 31 Desember 2021 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 diarahkan untuk akselerasi pencapaian sasaran pembangunan daerah diantaranya pada peningkatan aksi mitigasi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan adaptasi perubahan iklim, serta pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kesiapsiagaan, kapasitas dan pengurangan kerentanan secara lebih terencana dan berkesinambungan.

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 untuk sektor lingkungan hidup diarahkan pada pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui konservasi DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya air, perbaikan kualitas air sungai danau waduk, peningkatan tampungan air baku, pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air

tanah, pengendalian banjir dan rob, rehabilitasi Kawasan pesisir dan laut, pengelolaan sampah berbasis 3Ng (Ngelongi, Nggunakke, dan Ngolah), penerapan Good Mining Practice, konservasi energi, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dengan pendekatan pembangunan rendah akrbon yang berketahanan iklim.

Arah kebijakan nasional dan Provinsi tersebut menjadi acuan dan perhatian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun 2023 sehingga program kegiatan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Pemalang dapat turut berkontribusi terhadap sasaran nasional dan provinsi.

Tabel. 3.2 Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan di Jawa Tengah	Menurunnya pencemaran air permukaan	Indeks Kualitas Air	%	48,17	48,47	48,77	49,17	49,47	49,77	50,07	50,07
		Indeks Pencemaran Air	%	3,46	3,45	3,458	3,457	3,455	3,453	3,452	3,452
	Menurunnya pencemaran udara	Indeks Kualitas udara	%	83,91	84,21	84,51	84,71	84,91	85,01	85,11	85,11
		Indeks Pencemar SO2 dan NO2	%	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Meningkatnya LUASAN TUTUPAN VEGETASI (LTV)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76
		Luas Tutupan Lahan (LTV)	Ha	1.655,86	1.655,86	1.655,86	1.655,86	1.655,86	1.655,86	1.655,86	1.655,86
Meningkatkan pengelolaan sumber daya hutan/lahan secara lestari	Meningkatnya PDRB subsektor Kehutanan	Kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
		Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan	%	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik	Meningkatnya kinerja aparatur	Nilai Kepuasan Masyarakat	%	0	76,61	77	79	81	83	85	85
		Nilai SAKIP PD	%	66,62	77,75	79	80	80	81	81	81

III.2. Tujuan dan sasaran RENJA Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan dan mengemban tugas pokok dan fungsinya harus mampu menerjemahkan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026 yakni :

“ Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni “

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu diperhatikan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2021-2026 yang terkait dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, yaitu:

Misi ke 6 : “Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan”.

Untuk mewujudkan misi keenam sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yakni meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan.

**Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran RENJA Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2023
Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan	Meningkatkan Pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Indeks	69,37

III.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran RENJA DLH kabupaten Pemalang Tahun 2023 maka diperlukan rumusan Program dan Kegiatan. Dalam merumuskan Program dan Kegiatan terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain :

- a) Keserasian dan keterpaduan pembangunan lingkungan hidup dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2021– 2026.
- b) Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelatihan program dan kegiatan.

Secara garis besar program dan kegiatan RENJA DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Program dan kegiatan pada RENJA DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan program dan kegiatan dalam kerangka perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di bidang lingkungan hidup, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup.
- 2) Jumlah program yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebanyak 10 program dengan 17 kegiatan.
- 3) Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program/ kegiatan RENJA DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2023 sebesar **Rp. 25.195.640.000,-**, terdiri dari Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup **Rp. 7.521.888.000,-** dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan **Rp. 17.673.752.000,-**. Program dan Kegiatan Renja DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2023 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.5

Tabel. 3.5
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	SUMBER DANA	RENCANA PAGU ANGGARAN
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB					
2	1	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2	1	1	0		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	1	1	0	2	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				
2	1	1	0	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	APBD Kab. Pemalang	106.000.000
2	1	1	0	2	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Streategis (KLHS) Kabupaten/Kota				
2	1	1	0	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	APBD Kab. Pemalang	24.000.000
2	1	1	0	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	1	1	0	3	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				
2	1	1	0	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dokumen	APBD Kab. Pemalang	60.000.000
2	1	1	0	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	APBD Kab. Pemalang	14.460.000

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	SUMBER DANA	RENCANA PAGU ANGGARAN
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB					
2	1 1	0 3	2.0 1	0 3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 dokumen	APBD Kab. Pemalang	452.692.000
2	1 1	0 3	2.0 3	0 5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah restorasi yang dilakukan		APBD Kab. Pemalang	
2	1 1	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
2	1 1	0 4	2. 01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				
2	1 1	0 4	2.0 1	0 1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	APBD Kab. Pemalang	100.000.000
2	1 1	0 5			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
2	1 1	0 5	2. 01		Penyimpanan Sementara Limbah B3				
2	1 1	0 5	2.0 1	0 2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	25 laporan	APBD Kab. Pemalang	20.000.000
2	1 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
2	1 1	0 6	2. 01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh				

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	SUMBER DANA	RENCANA PAGU ANGGARAN
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB					
					Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
2	1 1	0 6	2.0 1	0 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 laporan	APBD Kab. Pemalang	160.000.000
2	1 1	0 8			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
2	1 1	0 8	2. 01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2	1 1	0 8	2.0 1	0 1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Instansi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4 lembaga	APBD Kab. Pemalang	67.371.000
2	1 1	0 8	2.0 1	0 2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	11 dokumen	APBD Kab. Pemalang	103.629.000
2	1 1	0 9			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
2	1 1	0 9	2. 01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
2	1 1	0 9	2.0 1	0 1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Pendidikan/Filantropi	11 entitas	APBD Kab. Pemalang	34.000.000

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	SUMBER DANA	RENCANA PAGU ANGGARAN
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB					
					dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH			
2	1 1	1 0			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
2	1 1	1 0	2. 01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota				
2	1 1	1 0	2.0 1	0 1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/ Ditangani	15 dokumen	APBD Kab. Pemalang	40.000.000
2	1 1	1 1			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
2	1 1	1 1	2. 01		Pengelolaan Sampah				
2	1 1	1 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 dokumen	APBD Kab. Pemalang	87.000.000
2	1 1	1 1	2.0 1	0 2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 laporan	APBD Kab. Pemalang	35.846.000
2	1 1	1 1	2.0 1	0 3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	80.0000 ton	APBD Kab. Pemalang	5.035.000.000

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	SUMBER DANA	RENCANA PAGU ANGGARAN
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB					
2	1 1	1 1	2.0 1	0 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	110 unit	APBD Kab. Pemalang	65.000.000
2	1 1	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
2	1 1	0 1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
2	1 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	APBD Kab. Pemalang	15.000.000
2	1 1	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	1 Laporan	APBD Kab. Pemalang	10.000.000
2	1 1	0 1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
2	1 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	172 orang/bulan	APBD Kab. Pemalang	14.367.272.000
2	1 1	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	APBD Kab. Pemalang	10.000.000
2	1 1	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	1 dokumen	APBD Kab. Pemalang	10.000.000

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	SUMBER DANA	RENCANA PAGU ANGGARAN
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB					
						bulanan/triwulanan/semesteran SKPD			
2	1 1	0 1	2.0 2	0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	1 dokumen	APBD Kab. Pemalang	10.000.000
2	1 1	0 1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
2	1 1	0 1	2.0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1 paket	APBD Kab. Pemalang	200.000.000
2	1 1	0 1	2.0 5	0 2	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	1 dokumen	APBD Kab. Pemalang	18.500.000
2	1 1	0 1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
2	1 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	APBD Kab. Pemalang	8.374.600
2	1 1	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	APBD Kab. Pemalang	10.650.000
2	1 1	0 1	2.0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	APBD Kab. Pemalang	5.545.400
2	1 1	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	APBD Kab. Pemalang	160.000.000
2	1 1	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan pengadaan	1 paket	APBD Kab. Pemalang	29.856.000
2	1 1	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	APBD Kab. Pemalang	6.650.000
2	1 1	0 1	2.0 6	0 9	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	200 laporan	APBD Kab. Pemalang	195.500.000
2	1 1	0 1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR SUB KEGIATAN	TARGET	SUMBER DANA	RENCANA PAGU ANGGARAN
URUSAN	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB					
					Urusan Pemerintah Daerah				
2	1 1	0 1	2.0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	21 unit	APBD Kab. Pemalang	48.450.000
2	1 1	0 1	2.0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor	2 unit	APBD Kab. Pemalang	17.000.000
2	1 1	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	1 1	0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2500 laporan	APBD Kab. Pemalang	10.000.000
2	1 1	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	APBD Kab. Pemalang	150.000.000
2	1 1	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	APBD Kab. Pemalang	3.306.480.000
2	1 1	0 1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
2	1 1	0 1	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya, Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 unit	APBD Kab. Pemalang	120.000.000
2	1 1	0 1	2.0 9	0 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah medel yang dipelihara	2 unit	APBD Kab. Pemalang	5.000.000
2	1 1	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	9 unit	APBD Kab. Pemalang	9.982.000
2	1 1	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dieplihara/direhabilitasi	3 unit	APBD Kab. Pemalang	58.200.000
2	1 1	0 1	2.0 9	1 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 unit	APBD Kab. Pemalang	8.180.000

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Pemalang 2021-2026 dan untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Pemalang 2021-2026, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Pemalang yang Adil, Makmur, Agamis dan Ngangeni”** yang ditempuh melalui tujuh misi.

Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Pemalang ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, maka dapat ditelaah dari Misi ke 6 (enam) yaitu **“Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan”** dan Tujuan dari RPJMD Kabupaten Pemalang yaitu Misi ini ditujukan untuk **“mewujudkan infrastruktur yang mantap dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup”**.

Selaku Perangkat Daerah yang menunjang Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang melaksanakan Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien, dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistic, integrative, dan spasial.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2023 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, adalah sebagaimana Tabel 4.1

Tabel 4.1 Usulan Program Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target		Pagu Indikatif				
						Nasional	Daerah							
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	11					25,195,640,000					54,169,000,000			
2	11	01				18,790,640,000					19,589,500,000			
2	11	01	201		Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		25,000,000				28,000,000			
2	11	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terkordinirnya penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	15,000,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	7 dokumen	17,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	10,000,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	1 laporan	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14,397,272,000					15,033,000,000	
2	11	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	172 orang / bulan	14,367,272,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	172 orang / bulan	15,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 dokumen	10,000,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	1 dokumen	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	11	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 dokumen	10,000,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	1 dokumen	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	202	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	10,000,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	1 dokumen	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			218,500,000					230,000,000		
2	11	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200,000,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	1 Paket	210,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	205	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 dokumen	18,500,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	1 dokumen	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah			416,576,000					441,500,000		
2	11	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	8,374,600			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	1 paket	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	10,650,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	1 paket	12,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	5,545,400			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	1 paket	6,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	11	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	160,000,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	1 paket	170,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	29,856,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	1 paket	31,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 dokumen	6,650,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	1 dokumen	7,500,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 lapora	195,500,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	200 laporan	205,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			65,450,000					69,000,000		
2	11	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 unit	48,450,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	21 unit	51,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 unit	17,000,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	2 unit	18,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3,466,480,000					3,571,000,000		
2	11	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	JUmlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2500 lapor	an 10,000,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	2500 lapor	an 11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	11	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	150,000,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	12 laporan	160,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	3,306,480,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	12 laporan	3,400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			201,362,000					217,000,000		
2	11	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 unit	120,000,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	28 unit	130,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	5,000,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	2 unit	6,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit	9,982,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	9 unit	11,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	58,200,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	3 unit	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	8,180,000			2. Pembangunan SDM berkarakter budaya unggul	12 unit	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			130,000,000					135,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	11	02	201		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			106,000,000					110,000,000		
2	11	02	201	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dokumen	106,000,000			1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	1 dokumen	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	02	202		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota			24,000,000					25,000,000		
2	11	02	202	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 dokumen	24,000,000			1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	1 dokumen	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			527,152,000					585,000,000		
2	11	03	201		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			527,152,000					585,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	11	03	201	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 dokumen	60,000,000			1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	2 dokumen	65,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	03	201	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	14,460,000			1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	1 dokumen	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	03	201	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 dokumen	452,692,000			1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	2 dokumen	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			100,000,000					120,000,000		
2	11	04	201		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			100,000,000					120,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	11	04	201	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 dokumen	100,000,000				1 dokumen	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			20,000,000					30,000,000		
2	11	05	201		Penyimpanan sementara Limbah B3			20,000,000					30,000,000		
2	11	05	201	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	25 laporan	20,000,000			1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	25 laporan	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			160,000,000					165,000,000		
2	11	06	201		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			160,000,000					165,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	11	06	201	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30 laporan	160,000,000			1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	30 laporan	165,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			171,000,000					180,000,000		
2	11	08	201		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			171,000,000					180,000,000		
2	11	08	201	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	4 lembaga	67,371,000			1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	4 lembaga	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	11	08	201	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	11 dokume	103,629,000			1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	11 dokume	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			34,000,000					35,000,000		
2	11	09	201		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			34,000,000					35,000,000		
2	11	09	201	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	11 entitas	34,000,000			1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	11 entitas	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			40,000,000					45,000,000		
2	11	10	201		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			40,000,000					45,000,000		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	11	10	201	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	15 dokume	n 40,000,000			1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	15 dokume	n 45,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			5,222,848,000					6,200,000,000		
2	11	11	201		Pengelolaan Sampah			5,222,848,000					6,200,000,000		
2	11	11	201	01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	1 dokumen	87,000,000			1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	1 dokumen	90,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11	201	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 laporan	35,848,000			1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana	1 laporan	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
2	11	11	201	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	80000 ton	5,035,000,000			1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana		80000 ton	6,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	201	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	110 unit	65,000,000			1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana		110 unit	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
TOTAL								25,195,640,000					54,169,000,000		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2023, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Renja DLH Kabupaten Pemalang selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2023 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja DLH Kabupaten Pemalang. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang nantinya akan ditetapkan dalam Renja DLH Kabupaten Pemalang tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Oleh karena itu penyelenggaraan seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja DLH Kabupaten Pemalang akan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.

V.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja DLH Kabupaten Pemalang Tahun 2023 dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel maka disusun kaidah-kaidah pelaksanaannya, sebagai berikut :

- a. DLH Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program, kegiatan yang akan dirumuskan dalam Renja DLHK Tahun 2023 setelah diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2023;
- b. DLH Kabupaten Pemalang berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD Tahun 2023 dengan

berpedoman kepada Renja DLH Tahun 2023 dan RKPD Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023.

- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja DLH Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023, Kepala DLH Kabupaten Pematang Jaya wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2023.
- d. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam kaidah pelaksanaan ini, dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V.2 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut disusunnya Renja DLH Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2023 ini, maka:

- a. Koordinasi yang intensif antara unsur eksekutif dan legislatif perlu ditingkatkan agar perencanaan program dan kegiatan Tahun 2023 dapat berjalan lancar.
- b. Demi kesempurnaan dokumen ini, maka saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan. Kami juga berharap agar dokumen ini dapat digunakan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam merumuskan program/kegiatan urusan lingkungan hidup tahun 2023.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.